

TRANSMIGRASI MERUPAKAN SEBUAH KEBUTUHAN NASIONAL

Prof. Dr. Wibowo, SE, MPhil

Pendahuluan

Transmigrasi telah melalui jalan yang panjang dan selama hampir 100 tahun telah mengalami gelombang pasang surut seiring dengan perubahan lingkungan strategis. Banyak ceritera tentang keberhasilannya, sebanyak kritik tajam tentang kekurangannya. Sayangnya, ceritera yang berkembang pada umumnya bersifat parsial, tidak memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh.

Penyelenggaraan transmigrasi memang mengandung kelebihan maupun kekurangannya. Namun yang lebih penting adalah pemahaman bahwa transmigrasi merupakan sebuah kebutuhan nasional. Kekurangan penyelenggaraan transmigrasi dapat terjadi pada setiap tahapan dalam prosesnya, karena terjadinya perubahan tuntutan jaman. Apa yang sudah berkembang baik pada suatu kurun waktu, dapat dinilai menjadi kurang baik pada kurun waktu berikutnya. Karena itu, penyelenggaraan transmigrasi ke depan perlu selalu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis.

Masalah nasional

Negara kita masih mengalami berbagai masalah yang bersifat multidimensi dan harus diatasi secara simultan dan sinergis. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan dan dikembangkan oleh bangsa ini, antara lain : melanjutkan pembangunan daerah, meningkatkan produksi pangan, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi golongan ekonomi lemah, dan masih banyak lagi.

Penyelenggaraan transmigrasi mempunyai peluang cukup besar untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi sebagian dari masalah nasional tersebut.

Analisa kelayakan transmigrasi

Pembangunan Daerah

Transmigrasi membuka daerah baru, suatu kawasan yang semula idel, tidur, tidak berfungsi, atau tidak berkembang, diubah menjadi kawasan permukiman dan produktif.

Dalam banyak hal transmigrasi telah berhasil membuka isolasi daerah, dengan

membangun jaringan dari lokasi transmigrasi ke pusat-pusat pemasaran, serta desa sekitarnya. Dengan terbukanya sarana transportasi, kawasan transmigrasi menjadi pull-factor bagi perkembangan ekonomi kawasan.

Dengan demikian pembangunan kawasan transmigrasi secara langsung merupakan perwujudan pembangunan daerah. Di dalam perjalanan penyelenggaraan transmigrasi, 59 lokasi telah tumbuh menjadi kecamatan dan 23 lokasi lainnya berkembang menjadi kabupaten. Lokasi-lokasi tersebut telah tumbuh dan berkembang menjadi pusat produksi, pusat pertumbuhan dan bahkan pusat administrasi.

Pertumbuhan kawasan transmigrasi tersebut, tidak dapat dipungkiri sebagai sumbangan positif penyelenggaraan transmigrasi bagi pembangunan daerah.

Produksi pangan nasional

Stabilitas pangan nasional merupakan salah satu unsur penunjang terciptanya stabilitas Negara kita. Stabilitas pangan dapat diperoleh manakala jumlah kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari negara lain.

Pulau Jawa sebagai sentra produksi pangan tradisional tidak dapat diharapkan lagi untuk meningkatkan produksinya. Intensifikasi telah sampai pada titik jenuh dan tidak dapat ditingkatkan lagi, terlebih lagi dengan makin lemahnya kemampuan pemerintah memelihara dan merehabilitasi saluran irigasi. Di sisi lain, lahan pertanian cenderung menyempit karena telah digunakan untuk kepentingan pembangunan lainnya, seperti perumahan, industri, infrastruktur dan lain-lain.

Memperhatikan kenyataan tersebut, solusi yang paling mungkin adalah dengan melakukan ekstensifikasi, membuka daerah baru, dan hal tersebut hanya mungkin dilakukan di daerah luar Jawa melalui program transmigrasi.

Penyelenggaraan transmigrasi telah membuktikan dirinya sebagai program yang mampu menumbuhkan pusat-pusat produksi. Banyak lokasi transmigrasi berkembang menjadi pusat produksi yang memenuhi kebutuhan pangan di tingkat kabupaten, propinsi dan bahkan antar propinsi. Beberapa propinsi yang semula harus mendatangkan kebutuhan pangannya dari propinsi lain, menjadi mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pengentasan kemiskinan

Kewajiban suatu negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Sementara itu jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan masih sangat besar jumlahnya. Transmigran pada umumnya berasal dari masyarakat kurang mampu, baik pendatang maupun penduduk local. Program transmigrasi memberikan bantuan berupa faktor produksi, untuk menghasilkan produk yang dapat di jual dan menjadi sumber pendapatan mereka.

Sebagian besar transmigran telah menunjukkan peningkatan kesejahteraan, antara lain ditandai oleh asset yang dimiliki, frekuensi pulang kampung, dan pendidikan anak-anak transmigran. Anak transmigran banyak yang telah berhasil menduduki jabatan militer dan pemerintahan, antara lain anggota DPRD, walikota, direktur, dan bahkan menjadi rektor.

Kesempatan kerja dan peluang usaha

Penyelenggaraan transmigrasi secara langsung memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi transmigran. Para calon transmigran pada umumnya adalah petani kecil atau buruh tani yang tidak menggunakan seluruh kapasitasnya, atau dalam posisi disguised unemployment atau under employment.

Peluang usaha juga tumbuh di kawasan transmigrasi untuk usaha ekonomi sekunder dan tertier, seperti proses produksi, transportasi, dan pemasaran produk transmigran.

Kesempatan kerja dan peluang usaha juga tumbuh di sektor yang terkait program transmigrasi. Pekerjaan perencanaan kawasan, kontraktor pembangunan kawasan, penyediaan perlengkapan transmigran, transportasi, penyediaan sarana produksi, catu pangan dan sebagainya.

Dengan demikian, program transmigrasi tidak hanya memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi para peserta transmigrasi saja. Program transmigrasi menciptakan spread-effect kegiatan usaha dan peluang kerja bagi sektor-sektor lain yang terkait.

Kelemahan penyelenggaraan transmigrasi

Terdapat banyak kejadian yang seringkali dinilai sebagai kekurangan atau kegagalan penyelenggaraan transmigrasi. Penilaian tersebut telah membentuk persepsi negatif masyarakat awam terhadap penyelenggaraan transmigrasi.

Lokasi transmigrasi tidak berkembang

Penunjukkan lokasi transmigrasi ditentukan oleh pemerintah daerah.

Lokasi yang ditentukan seringkali sangat terpencil, dengan harapan membuka isolasi daerah, tanpa disadari bahwa pembangunan kawasan terpencil sangatlah mahal dan memerlukan investasi infrastruktur lebih banyak.

Disisi lain, keterpencilan lokasi tersebut telah mempersulit pemasaran produk transmigran sehingga pendapatan transmigran rendah. Sebagai akibatnya, lokasi transmigrasi sulit berkembang, dan tidak jarang menjadi masalah yang akibatnya mengimbas pemerintah daerah sendiri.

Upaya membuka isolasi daerah pada dasarnya positif, tetapi memerlukan lebih banyak investasi yang kenyataannya tidak mampu disediakan pemerintah. Ke depan, pembukaan lokasi baru harus lebih mengutamakan aksesibilitas yang lebih menjamin pemasaran.

Kegagalan panen

Kegagalan panen di lokasi transmigrasi pada umumnya disebabkan oleh ketidak suburhan lahan, kualitas penyiapan lahan, kualitas sarana produksi, serangan hama dan perubahan musim tanam.

Lahan pertanian yang kurang subur dan tidak diimbangi dengan penyediaan pupuk atau kapur yang

memadai, potensi untuk menyebabkan kegagalan panen.

Kagagalan tersebut di dorong pula oleh kualitas penyiapan lahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis karena harga satuan yang rendah. Di sisi lain tumpukan sisa tebangkan menjadi sarang hama penyakit tanaman.

Kegagalan panen dapat pula bersumber pada kualitas sarana produksi yang diterima transmigran sangat rendah sehingga tingkat pertumbuhannya rendah. Hal tersebut berdampak pada kemampuan lahan memberikan hasil. Sementara itu perubahan musim tanam, dari kebiasaan yang secara tradisional dipahami petani juga memberikan sumbangan bagi kegagalan panen.

Pemindahan kemiskinan

Program transmigrasi sering di konotasikan sebagai pemindahan kemiskinan. Pernyataan tersebut untuk sebagian mengandung kebenaran, walaupun untuk sebagian besar tidak demikian.

Calon transmigran pada umumnya relatife miskin, dan harus diakui bahwa untuk sebagian tidak berhasil, sehingga timbul kesan bahwa transmigrasi memindahkan kemiskinan. Namun patut pula diakui bahwa untuk sebagian besar

transmigran berhasil mengembangkan diri dan keluarganya.

Transmigran ulang-alik

Sebagian transmigran tingkat motivasinya rendah sehingga rentan terhadap ketidak-berhasilan. Golongan transmigran seperti ini cenderung meninggalkan lokasi dan pulang setelah satu pangan habis atau menghadapi kesulitan.

Diantara mereka ada yang mendaftar ulang sebagai transmigran melalui tempat pemberangkatan dan tujuan yang berbeda, sehingga tidak terdeteksi petugas. Tipologi transmigran semacam ini sering dinamakan transmigran ulang-alik. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi dapat menimbulkan kesan negatif terhadap program transmigrasi.

Penduduk lokalpun banyak yang menjadi transmigran ulang-alik dengan bentuk yang berbeda. Peserta transmigrasi penduduk lokal banyak berasal dari kampung sekitar lokasi permukiman transmigrasi. Mereka cenderung masih tinggal di desanya dan datang ke lokasi transmigrasi pada saat pembagian bantuan pemerintah.

Kesenjangan sosial

Kesenjangan sosial dirasakan

apabila dilakukan pembangunan permukiman transmigrasi berdekatan dengan desa lama. Mereka yang turut serta dalam program transmigrasi mendapatkan berbagai bantuan, sedang bagi desa lama tidak mendapat bantuan. Bentuk bantuan yang diberikan adalah dengan mengikut sertakan sebagian penduduk dalam program transmigrasi dengan segala hak dan kewajibannya.

Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian memungkinkan memberikan bantuan pada desa sekitarnya. Namun dalam aplikasinya terdapat kesulitan karena terbatasnya anggaran dan system penganggaran tidak mendukung.

Program transmigrasi sebenarnya bersifat dilematis. Apabila berhasil dan transmigrannya sejahtera, maka dikatakan menimbulkan kesenjangan sosial. Namun apabila tidak berhasil dan masyarakatnya miskin dianggap memindahkan kemiskinan.

Paradigma baru transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi terbukti merupakan kebutuhan nasional, namun untuk meningkatkan kinerjanya perlu dilakukan dengan paradigma baru yang lebih sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Beralih dari pendekatan Demografis menjadi pendekatan Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan.

Dari segi demografis penyelenggaraan transmigrasi dipandang tidak signifikan untuk mengatasi masalah kependudukan. Didalam implementasi penyelenggaraan transmigrasi, disamping penduduk daerah padat yang dipindahkan, dimasukkan pula sebagian unsur penduduk setempat di sekitar lokasi permukiman transmigrasi sebagai transmigran. Pendekatan penyelenggaraan transmigrasi dengan pemahaman seperti tersebut diatas dapat dinilai sebagai pendekatan demografis.

Tanpa mengurangi makna pengertian transmigrasi, pendekatan tersebut mulai ditinggalkan. Pendekatan yang dianut sekarang ini diletakkan pada pembangunan daerah dan kesejahteraan. Program transmigrasi dilakukan untuk membangun daerah dan mensejahterkan sebagian penduduk yang turut serta dalam program transmigrasi. Namun dampak pembangunan transmigrasi harus dapat dinikmati pula oleh masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian, penyelenggaraan transmigrasi dilakukan karena adanya

kebutuhan akan pembangunan daerah. Daerah yang mempunyai potensi lahan untuk kawasan transmigrasi, ingin membangun daerahnya namun mempunyai keterbatasan dalam sumberdaya manusia. Untuk itu perlu mengundang sumberdaya manusia yang berlebih dari daerah lain. Namun sumberdaya manusia yang didatangkan harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Disisi lain terdapat daerah lain yang kelebihan jumlah penduduk sehingga menjadi beban berat dalam melakukan pembangunan di daerahnya. Dengan demikian sebagian dari penduduknya yang memenuhi persyaratan dapat disertakan dalam program transmigrasi. Namun masyarakat dari daerah ini dapat pula mempunyai preferensi daerah pilihan.

Dengan demikian proses penyelenggaraan transmigrasi pada hakikatnya merupakan proses tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Proses perpindahan baru terjadi apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi pada dasarnya dapat dilakukan melalui kerjasama antara dua daerah atau lebih.

Namun untuk mensinergikan kerjasama antar daerah tersebut dan menetapkan kriteria persyaratan penyelenggaraan transmigrasi diperlukan peran serta pemerintah pusat. Peran serta tersebut dapat pula berupa pemberian dukungan untuk keberhasilan program yang diselenggarakan oleh daerah-daerah tersebut.

Bahwa tujuan dan mekanisme penyelenggaraan transmigrasi boleh saja berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi lingkungan, namun deskripsi pengertian transmigrasi, selama terminologi transmigrasi tersebut masih dipakai, tidak dapat dilepaskan dari masalah demografis.

Perubahan paradigma demografis menjadi pembangunan daerah mengandung makna pengukuran keberhasilan ditentukan dari keberhasilan pembangunan daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. Bukan pada jumlah orang atau keluarga yang dipindahkan.

Perhatian lebih besar diberikan kepada desa dan masyarakat setempat dengan mengintegrasikan dalam program transmigrasi.

Pengembangan kawasan transmigrasi dapat berasal dari areal yang sama sekali masih bebas, namun dapat pula berdekatan dengan desa sekitar.

Kepada masyarakat sekitarnya dapat diikutsertakan dalam program transmigrasi melalui pengikutsertaan sebagai transmigran, atau dalam bentuk pemberian bantuan pemberdayaan kepada masyarakat desa yang ada.

Penyertaan masyarakat desa sekitar kedalam program transmigrasi diarahkan pada mereka yang belum memiliki lahan, sehingga dengan keikutsertaan dalam program transmigrasi dapat memiliki faktor-faktor produksi yang dapat memberikan sumber pendapatan.

Bagi desa sekitar yang menjadi bagian dari suatu kawasan transmigrasi dapat diberikan bantuan pemberdayaan masyarakat desa, tanpa harus pindah dari desanya ke permukiman baru. Bantuan pemberdayaan dapat berupa infrastruktur fisik maupun sarana usaha produktif untuk memberikan peluang peningkatan usaha ekonominya.

Dengan bantuan pemberdayaan seperti tersebut menumbuhkan dukungan masyarakat setempat terhadap program transmigrasi. Kesenjangan perlakuan antara masyarakat setempat dengan transmigran dapat dipersempit.

Perubahan peran pemerintah pusat beralih dari sifat Direktif menjadi Akomodatif.

Peran pemerintah pusat pada waktu yang lalu selalu memberikan arahan dan petunjuk kepada daerah tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana mengerjakannya. Selanjutnya dari perangkat aparat daerah meneruskan hal yang sama kepada masyarakat di kawasan transmigrasi. Dengan demikian proses penyelenggaraan transmigrasi bersifat sangat sentralistik, direktif, dan top-down. Terlepas dari beberapa kelebihan, metoda tersebut mengandung banyak kelemahan. Antara lain terletak pada lemahnya inisiatif, motivasi, kreativitas dan inovasi para penyelenggara program transmigrasi. Sebagai akibatnya, penyelenggaraan program transmigrasi tidak berkembang secara dinamis.

Ke depan, pemerintah pusat lebih banyak menyerahkan kewenangan kepada daerah dan seterusnya dari perangkat daerah kepada masyarakat di kawasan transmigrasi, sehingga sifatnya lebih desentralistik. Keinginan masyarakat di kawasan transmigrasi diakomodir melalui proses bottom-up. Proses pemberian wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat tersebut menumbuhkan rasa percaya diri di lingkungan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Dengan proses demikian diharapkan

terjadi peningkatan motivasi, kreativitas, dan inovasi para penyelenggara program transmigrasi yang pada gilirannya mendinamisir proses penyelenggaraan transmigrasi.

Pengembangan masyarakat beralih dari pendekatan Pembinaan menjadi pendekatan Pemberdayaan.

Pada dasarnya sebagian terbesar transmigrasi berawal dari kondisi sikap ketidak berdayaan, ketergantungan, dan ketidak-mampuan. Faktor yang masih menguntungkan adalah bahwa kebanyakan diantara mereka masih mempunyai motivasi untuk memperbaiki kehidupannya.

Oleh karena itu, pembinaan masyarakat harus diarahkan pada berkurangnya sikap ketergantungan dan kemandirian. Pembinaan perlu diarahkan pada tumbuhnya budaya kerja produktif, kerja keras, tidak gampang menyerah. Budaya yang selalu minta petunjuk dan bimbingan perlu diubah menjadi budaya kreatif, inovatif, partisipatif dan kemandirian. Pemberdayaan mengandung makna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dan mengatur dirinya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Penutup

Program transmigrasi diperlukan untuk menjawab beberapa persoalan nasional. Namun dalam aplikasinya perlu lebih memperhatikan kepentingan daerah, sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah.

Disamping terdapat banyak keberhasilan dalam penyelenggaraan transmigrasi, perlu diakui pula bahwa masih terdapat berbagai kelemahan yang masih perlu disempurnakan di masa depan.

Untuk itu, guna melakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan transmigrasi diperlukan adanya paradigma baru yang lebih sesuai. Paradigma baru transmigrasi muncul sebagai perwujudan dari keinginan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Namun untuk operasionalisasinya diperlukan tersedianya kondisi yang konduktif bagi terjadinya proses perubahan.***

Selamat membaca.